



RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH

(RENJA)

TAHUN 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2026 dapat terselesaikan tepat waktu. Program dan kegiatan dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan atas usulan dari setiap bidang dan seksi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan mengacu kepada tugas pokok, fungsi, kewenangan dan urusan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Keuangan Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat ukur/review sejauh mana pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Lebih jauh lagi, Renja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan, panduan dan manfaat bagi institusi pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut mendukung terselesaikannya penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Semoga semua yang tertuang dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi acuan untuk pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun selanjutnya.

Sarilamak, 30 Desember 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Drs. A. Z. Uddi Perama Putra, M.Si
NIP. 19690218 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I1

PENDAHULUAN1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum6

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistimatika Penulisan 10

BAB II11

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah34

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....37

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD44

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan oleh Masyarakat..69

BAB III.....70

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH70

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional70

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....72

3.3. Program dan Kegiatan75

BAB IV88

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH88

BAB V125

PENUTUP125

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 2025 125

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 126

5.3. Rencana Tindak Lanjut..... 127

DAFTAR TABEL

1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah..... 18

2. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Kabupaten
Lima Puluh Kota...36

3. Tabel 2.3 Identifikasi
Permasalahan.....38

4. Tabel 2.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan
Keuangan.....42

5. Tabel T-C. 31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2024.....46

6. Tabel T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku
Kepentingan.....69

7. Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penunjang Usrusan pemerintah
Daerah.....76

8. Tabel T-B.36 Identifikasi Permasalahan untuk penentuan Program
Prioritas.....86

9. Tabel T-C 33 Program Kegiatan dan Pagu Pendanaan Tahun
2025.....87

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Berpedoman pada pasal 128 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir;
6. Penetapan Renja PD.

Berikut adalah tabel penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:

Tabel 1.1
Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2026

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024																2025																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
A.	Persiapan Penyusunan Renja 2026																																																
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																																
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																																
3	Orientasi Mengenai Renja Perangkat Daerah																																																
4	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD																																																
B.	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026																																																
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026 berdasarkan Ranwal RKPD dan Renstra OPD																																																
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																																
3	Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk																																																

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024								2025																																	
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
	Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																										
C.	Penyusunan Rancangan Renja 2026																																										
1	Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pikir serta hasil Musrenbang																																										
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																										
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																										
D.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																										

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024								2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Pelaksanaan Forum PD Perangkat Daerah yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

1.1.1. Proses Penyusunan Renja

I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan *Ex- Officio* yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2024.
2. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2024, telah mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah oleh tim penyusun hingga batas waktu penyampaian pada tanggal 21 Februari 2025. Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029, hasil evaluasi hasil Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD. Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/forum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Kemudian rancangan Renja PD kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan

ranwal RKPD menjadi RKPD. Penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dimulai proses penyusunannya pada minggu ke-4 Februari 2025. Kemudian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja PD untuk menjamin rancangan Renja PD sudah selaras dengan ranwal RKPD.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Forum Perangkat Daerah/Lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Forum Perangkat Daerah/Lintas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja PD. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas PD.

Forum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2025 di Aula Lantai II Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan lainnya yang dihadiri secara luring (*offline*) dan daring (*online*).

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi rancangan akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dimulai pada bulan Juli 2025 dan diserahkan kepada Kepala Bapelitbangda untuk diverifikasi.

VI. Penetapan Renja PD

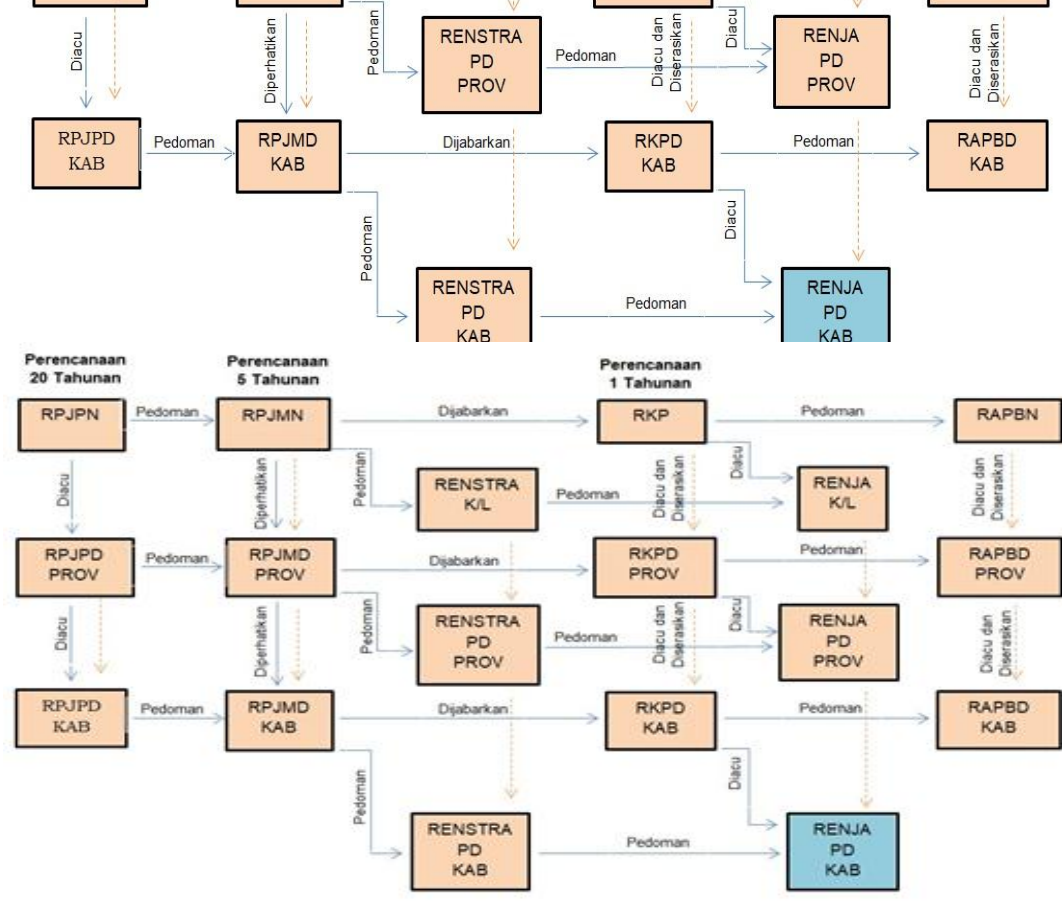
Rancangan akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang telah disampaikan kepada Kepala Bapelitbangda diverifikasi

untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaras dengan Perkada tentang RKPD dan Renja PD lainnya. Apabila dalam hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bapalitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan rancangan akhir Renja PD tersebut dan disampaikan kembali oleh Kepala PD kepada Kepala Bapalitbangda

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempedomani Peraturan Bupati NomorTahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Setelah seluruh tahapan proses penyusunan Renja dilaksanakan, selanjutnya Renja PD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju.

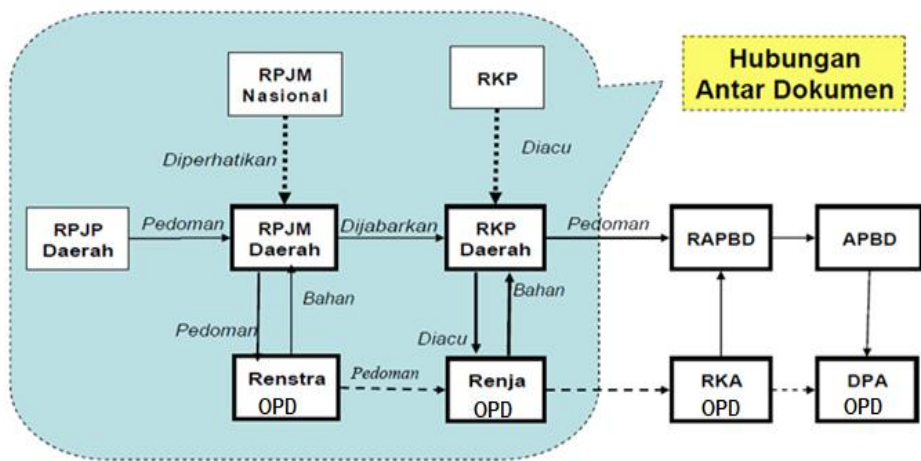
Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan Renja Provinsi serta K/L. Dengan kata lain penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Sumatera Barat, RPJM Provinsi Sumatera Barat, RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Renstra K/L, Renstra PD Provinsi Sumatera Barat, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja K/L dan Renja PD Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



1.1.2.Keterkaitan Antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Penyusunan RPJMD dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD, penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke kesatu dalam ruang lingkup RPJPD 2025-2045.

Pada tingkatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra adalah visi dan misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun kedepan. Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029.

Terkait dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra Badan Keuangan) Tahun 2021-2026.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan , Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah harus segera menetapkan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah masing-masing, Maka Badan Keuangan harus segera menyusun dan menetapkan Renja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Peggunaannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 18).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Lalu.
Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan sebagainya.
- III. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

V. Penutup

Berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 2025 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2024, dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan badan Keuangan dan/atau realisasi APBD untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan 6 kondisi di atas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Di samping itu, juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disajikan pada tabel 2.1 di halaman berikut ini:

Tabel . 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan s/d Tahun 2025
Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah: Badan Keuangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan IV Tahun 2024	
									Target Kinerja Renja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)
5	2				KEUANGAN									
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	85 Poin	- 85	-	-	-	85	85 Poin	85 Poin
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra , Renja (Dokumen)	20 Dok	8 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	4 Dok	12 Dok	60 %
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	50 %

						Penyusunan Dokumen RKA SKPD										
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	- Dok	2 Dok	33 %		
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	50 %		
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	20 Dok	8 Dok	2 Dok	4 Dok	100 %	4 Dok	12 Dok	60 %		

5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	60	Dok	24	Dok	12	Dok	12	Dok	100	%	-	Dok	24	Dok	40	%
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJiP , PK , RKT , IKU , RAP, LKPJ, LPPD , EKPP, SIRUP , SPIP , Gender)	40	Lap	16	Lap	12	Lap	12	Lap	100	%	8	Dok	24	Lap	60	%
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	85	Poin	-	85	-	-	-	85	85	Point	85	Poin	85	Poin	85	Poin
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	60	Bulan	24	Bulan	64	Orang /Bulan	12	Bulan	100	%	12	Bulan	36	Bulan	60	%
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5	Dok	2	Dok	1	Dok	1	Dok	100	%	1	Dok	3	Dok	60	%

						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semester	85 Dok	34 Dok	13 Dok	17 Dok	100 %	17 Dok	51 Dok	60 %		
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	- Dok	2 Dok	40 %		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	85 Poin	85		-	-	85	85 Poin	85 Poin		
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	970 Stel	106 Stel	0 Stel	0 Stel	0 %	- Stel	212 Stel	22 %		
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang	10 Kali	4 Kali	7 Kali	2 Kali	100 %	2 Kali	6 Kali	60 %		

						Undangan									
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis ImplementasPeraturan Perundang-Undangan	30 Kali	6 Kali	1 Kali	4 Kali	100 %	1 Kali	7 Kali	23 %	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	50 %	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	50 %	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	50 %	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	50 %	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	50 %	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	135 Dok	48 Dok	24 Dok	36 Dok	17 %	12 Dok	72 Dok	53 %	

					undangan	Perundang-undangan									
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	144 Lap	48 Lap	24 Lap	24 Lap	100 %	24 Lap	72 Lap	50 %	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540 Lap	180 Lap	60 Lap	90 Lap	81 %	90 Lap	270 Lap	50 %	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100 %	100%		-	-		%	%	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	- Unit	- Unit	- Unit	- %	- Unit	- Unit	- %	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	30 Unit	5 Unit	0 Unit	5 Unit	100 %	- Unit	10 Unit	33 %	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	13 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	5 Unit	33 %	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100 %	100 %	-	-	-	100	100 %	200 -	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Lap	2 Lap	1 Lap	1 Lap	50 %	1 Lap	3 Lap	50 %	

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Lap	2 Lap	12 Lap	1 Lap	75 %	1 Lap	3 Lap	50 %
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Lap	2 Lap	12 Lap	1 Lap	75 %	1 Lap	3 Lap	50 %
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100 %	- 100%	-	-	-	100	100 %	100 %
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198 Unit	66 Unit	33 Unit	33 Unit	84 %	33 Unit	99 Unit	50 %
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210 Unit	70 Unit	35 Unit	35 Unit	88 %	33 Unit	103 Unit	49 %
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	1 Unit	- Unit	- Unit	- %	- Unit	1 Unit	17 %
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	100 %	WTP	100 WTP	100 %
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	100 %	WTP	100 WTP	100 %

					Rencana Anggaran Daerah										
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	"1. KUA dan PPAS (2 dok) 2. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah"	12 Dok	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	6 Dok	50 %	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. KUA-P dan PPAS-P 2. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	12 Dok	4 Dok	2 Dok	2 Dok	0 %	2 Dok	6 Dok	50 %	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan RKA SKPD	276 Dok	92 Dok	46 Dok	46 Dok	100 %	46 Dok	138 Dok	50 %	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	276 Dok	92 Dok	46 Dok	46 Dok	100 %	46 Dok	138 Dok	50 %	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	276 Dok	92 Dok	48 Dok	46 Dok	100 %	46 Dok	138 Dok	50 %	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1. Dokumen Perubahan DPA SKPD (46 DPPA)	276 Dok	92 Dok	46 Dok	46 Dok	100 %	46 Dok	138 Dok	50 %	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan	36 Dok	12 Dok	6 Dok	6 Dok	100 %	6 Dok	18 Dok	50 %	

					Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	72	Dok	48	Dok	12	Dok	12	Dok	100	%	12	Dok	36	Dok	50	%
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1.032	Dok	172	Dok	172	Dok	172	Dok	100	%	172	Dok	516	Dok	50	%
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	16	Dok	4	Dok	4	Dok	4	Dok	100	%	-	Dok	8	Dok	50	%
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi , Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana transfer Lainnya	480	Dok	80	Dok	80	Dok	80	Dok	100	%	80	Dok	240	Dok	50	%
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi	4	Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-	%	-	Kali	-	Kali	-	%

					Bukan Bank											
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1. Data realisasi tunjangan profesi guru 2. Data realisasi tambahan penghasilan guru 3. Data realisasi tunjangan khusus guru 4. Data realisasi DAU 5. Data realisasi DAK 6. Data realisasi DBH	108 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100 %	18 Dok	54 Dok	50 %		
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1. Koordinasi Piutang dan Utang Daerah 3 (Catur Wulan) 2. Dokumen Piutang dan Utang Daerah 2 (SMT) 3. Penempatan Deposito Pemda 4 (Tahapan)	54 Kali	9 Kali	9 kali	9 kali	100 %	- kali	18 Kali	33 %		
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	516 Dok	86 Dok	86 Dok	86 Dok	100 %	- Dok	172 Dok	33 %		

						Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait																
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6	Peraturan	1	Peraturan	1	Peraturan	1	Peraturan	100	%	1	Peraturan	3	Peraturan	50	%
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP		WTP		WTP		WTP		100	%	WTP		WTP		100	%
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan 2. Laporan Pertanggungjawaban Triwulan 3. laporan Keuangan Semester 4. laporan Prognosis	96	Dok	16	Dok	16	Dok	16	Dok	100	%	-	Dok	32	Dok	33	%

5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Lo dan beban	Jumlah dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Lo dan Beban	72 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	36 kali	50 %
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Konsultasi Ke BPK	24 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100 %	4 kali	12 Kali	50 %
						- Penyampaian Laporan ke Propinsi	18 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100 %	3 Dok	9 Dok	50 %
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD (43 OPD)	258 Lap	43 Lap	43 Lap	43 Lap	100 %	43 Lap	129 Lap	50 %
						2. Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD (23 puskesmas, 1 RSUD)	144 Lap	24 Lap	24 Lap	24 Lap	100 %	24 Lap	72 Lap	50 %
						3. Rekonsiliasi data BLUD (4 Kali)	24 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100 %	4 Kali	12 Kali	50 %
						4. Rekonsiliasi data Keuangan dengan BUMD	6 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100 %	1 Kali	3 Kali	50 %

5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Ranperda tentang LPP APBD (60 buku)	360	Buku	60	Buku	60	Buku	60	Buku	100	%	60	Buku	180	Buku	50	%
						2. Nota Penyampaian LPP APBD (60 buku)	360	Buku	60	Buku	60	Buku	60	Buku	100	%	60	Buku	180	Buku	50	%
						3. Perda APBD (60 buku)	360	Buku	60	Buku	60	Buku	60	Buku	100	%	60	Buku	180	Buku	50	%
						4. Konsultasi ke Propinsi dan Pusat (4 kali)	24	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	100	%	4	kali	12	Kali	50	%
						5. Penyampaian Rancangan Perda LPP ke Propinsi (4 kali)	24	Kali	4	Kali	4	Kali	4	Kali	100	%	4	kali	12	Kali	50	%
						6. Penyampaian Evaluasi (1 kali)	6	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	%	1	Kali	3	Kali	50	%
						7. Penyampaian Perda LPP ke Pusat (1 kali)	6	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	%	1	Kali	3	Kali	50	%
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK (4 dok)	24	Dok	4	Dok	4	Dok	4	Dok	100	%	-	Dok	8	Dok	33	%

					Pelaksanaan APBD										
						- Penyampaian LHP ke BPK (4 dok)	24 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	- Dok	8 Dok	33 %	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan Inspektorat	12 Kali	- Kali	- Kali	- Kali	- %	-	- kali	- %	
						- Terlaksananya tindak lanjut TPTGR	6 Kali	- Kali	- Kali	- Kali	- %	-	- kali	- %	
						- Tersedianya data TPTGR dari OPD	12 Dok	- Dok	- Dok	- Dok	- %	-	- Dok	- %	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.Laporan Analisis Pertanggungjawaban APBD	12 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100 %	- Lap	4 Lap	33 %	
						2.Laporan Evaluasi Gubernur atas Ranperda LPP APBD	12 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100 %	- Lap	4 Lap	33 %	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1. Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	360 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	100 %	60 Buku	180 Buku	50 %	

						2. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah	360 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	100 %	60 Buku	180 Buku	50 %
						3. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah (60 buku)	360 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	100 %	60 Buku	180 Buku	50 %
						4. Konsultansi ke propinsi dan ke komite standar akuntansi pemerintah kementerian keuangan RI (2 kali)	12 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100 %	2 Kali	6 Kali	50 %
						5. Jasa konsultasi pendampingan revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi (1 paket)	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	3 Paket	50 %
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.Perubahan Sistem dan prosedur akuntansi	360 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	100 %	- Buku	120 Buku	33 %
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	1. laporan keuangan daerah (Buku)	6 Buku	1 Buku	6 Buku	6 Buku	100 %	- Buku	7 Buku	117 %

					Kabupaten/Kota									
						2. Peningkatan SDM Penyusunan laporan keuangan daerah	12 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100 %	- Kali	4 Kali	33 %
						3. Bimtek penyusunan laporan keuangan (2 kali)	12 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100 %	- Kali	4 Kali	33 %
						4. Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah (1 paket)	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	- Paket	2 Paket	33 %
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas	6 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100 %	1 Kali	3 Kali	50 %
						2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD	18 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	100 %	3 Bulan	9 Bulan	50 %
						3. Konsultasi ke Komite Standar	6 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100 %	1 Kali	3 Kali	50 %

						Akuntansi									
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	72 Bulan	- Bulan	- Bulan	- Bula n	- %	-	- Bulan	- %	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	- WTP	WT P -	WTP -	100 %		WTP	100 %	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana BH Pajak dan Retribusi	474 Nag	79 Nag	79 Nag	79 Nag	- %	79 Nag	237 Nag	50 %	
						Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBD	474 Nag	79 Nag	79 Nag	79 Nag	100 %	79 Nag	237 Nag	50 %	
						Teralokasikanny a Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBN	474 Nag	79 Nag	79 Nag	79 Nag	100 %	79 Nag	237 Nag	50 %	
						Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	474 Nag	79 Nag	79 Nag	79 Nag	100 %	79 Nag	237 Nag	50 %	
						Tersalurnya DD dan ADD	474 Nag	79 Nag	79 Nag	79 Nag	100 %	79 Nag	237 Nag	50 %	
						Terwujudnya pelaksanaan bantuan keuangan untuk Partai Politik	474 Nag	79 Nag	79 Nag	79 Nag	100 %	79 Nag	237 Nag	50 %	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan	Tersedianya Belanja Tidak	78 Kec	6 Kec	13 Kec	3 Kec	23 %	13 Kec	22 Kec	28 %	

					Mendesak	Terduga									
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	474 Nag	79 Nag	79 Nag	79 Nag	100 %	79 Nag	237 Nag	50 %	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengeloaan Keuangan Daerah secara elektronik	95 %	95 %	-	-	-		95 %	95 %	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan SIPD	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bula n	100 %	12 Bulan	36 Bulan	50 %	
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Whorkshop Aplikasi dan Sosialisasi	176 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Oran g	100 %	50 Orang	242 Orang	138 %	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP			100 %		WTP	100 %	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	100 %	100 %					100 %	100 %	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Buku daftar harga satuan barang dan jasa (55 buku)	330 Buku	55 Buku	55 Buku	55 Buku	100 %	55 Buku	165 Buku	50 %	

5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku standar kebutuhan Barang Milik Daerah	6	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	100	%	-	Dok	2	Dok	33	%
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKBMD	330	Buku	55	Buku	55	Buku	55	Buku	100	%	55	Buku	165	Buku	50	%
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKPMD	330	Buku	55	Buku	55	Buku	55	Buku	100	%	-	Buku	110	Buku	33	%
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Keuangan Daerah (Buku lampiran aset 20 buku)	120	Buku	20	Buku	20	Buku	20	Buku	100	%	-	Buku	40	Buku	33	%
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Keuangan Daerah (Buku inventaris aset 20 buku)	120	Buku	20	Buku	20	Buku	20	Buku	100	%	-	Buku	40	Buku	33	%
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Sertifikasi tanah	90	Pensil	15	Pensil	15	Pensil	15	Pensi 1	100	%	25	Pensil	55	Pensil	61	%
						- pancang tanah	204	Buah	34	Buah	34	Buah	10	Buah	29	%	20	Buah	64	Buah	31	%
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	- Sertifikasi tanah	1.488	Pensil	248	Pensil	200	Pensil	200	Pensi 1	100	%	-	Pensil	448	Pensil	30	%
						- pancang tanah	204	Buah	34	Buah	34	Buah	34	Buah	100	%	-	Buah	68	Buah	33	%
						- penghapusan	180	Buah	30	Buah	30	Buah	30	Buah	100	%	-	Buah	60	Buah	33	%
						- penilaian gedung	180	Buah	30	Buah	30	Buah	30	Buah	100	%	-	Buah	60	Buah	33	%
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	480	Buah	80	Buah	80	Buah	80	Buah	100	%	80	Buah	240	Buah	50	%

5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan BMN	6 Dok	1 Dok	1 Dok	- Dok	- %	- Dok	1 Dok	17 %
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi BMD (laporan semester I dan II	120 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	100 %	20 Buku	60 Buku	50 %
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD dari OPD (Laporan Tahunan)	120 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	100 %	20 Buku	60 Buku	50 %
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek terhadap 43 OPD	258 OPD	43 OPD	43 OPD	43 OPD	100 %	- OPD	86 OPD	33 %
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	0,8%	: 0,8%	: 0,8%	: 0,8%	: 0,8 %		: 0,8%	: 0,8 %
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	: 0,8%	: 0,8%	: 0,8%	: 0,8%	: 0,8 %		: 0,8%	: 0,8 %
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	- Tersusunnya potensi pajak daerah	6 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	50 %
						- Tersusunnya ranperbup pajak daerah	12 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	6 Dok	50 %

5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terbentuknya kerjasama dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah	6 Dok	1 Dok	1 Dok	- 1	- %	1 Dok	2 Dok	33 %
						- Terlaksanya koordinasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah	60 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	100 %	10 Lap	30 Lap	50 %
						- Tersusunnya ranperbup/ranp erda Pajak Daerah	24 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	4 Dok	12 Dok	50 %
						- Tersusunnya SOP Pajak Daerah	24 SOP	4 SOP	4 SOP	4 SOP	100 %	4 SOP	12 SOP	50 %
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi terhadap WP dan aparatur	24 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100 %	4 Kali	12 Kali	50 %
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya alat dan SPM penunjang pendataan dan penilaian	12 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	6 Jenis	50 %
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Melakukan Pendataan OP dan WP	270 OP	45 OP	45 OP	45 OP	100 %	45 OP	135 OP	50 %
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Tersedianya Basis Data Pajak Daerah	6 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	3 Dok	50 %
						- Tersusunnya Laporan Basis Data Pajak	12 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100 %	2 Lap	6 Lap	50 %

						Daerah									
						- Tersedianya Software/aplika si pajak daerah	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	- Unit	2 Unit	40 %	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penillaian objek pajak dan wajib retribusi (100 OP)	600 OP	100 OP	100 OP	100 OP	100 %	100 OP	300 OP	50 %	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penggantian objek pajak dan retribusi (250 OP)	1.500 OP	250 OP	250 OP	250 OP	100 %	250 OP	750 OP	50 %	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlayannya keberatan/kelu han wajib pajak	240 WP	40 WP	40 WP	40 WP	100 %	40 WP	120 WP	50 %	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen hasil penelitian dan verifikasi data SP dan OP	30 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100 %	5 Dok	15 Dok	50 %	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan hasil Penagihan Pajak	24 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	12 Lap	50 %	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terfasilitasinya keberatan wajib pajak	40 WP	10 WP	4 WP	4 WP	100 %	- WP	14 WP	35 %	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Terlaksananya pembinaan dan penertiban pajak daerah	48 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	100 %	8 Kali	24 Kali	50 %	
						- Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	30 WP	5 WP	5 WP	5 WP	100 %	5 WP	15 WP	50 %	
						- Terlaksananya	120 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	100 %	20 Kali	60 Kali	50 %	

						monitoring pajak daerah									
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Terlaksana monitoring Retribusi Daerah	72 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100 %	12 Kali	36 Kali	50 %	
						- Terlaksana rapat monev Retribusi Daerah	24 Kali	4 Kali	1 Kali	1 Kali	100 %	4 Kali	9 Kali	38 %	
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transakssi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	18 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100 %	3 Lap	9 Lap	50 %	

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2024 program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan yaitu:

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota realisasi keuangan sebesar 73,60%, yang mana Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota tidak dapat ditetapkan karena tidak tercapainya kesepakatan dengan DPRD.
2. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah realisasi keuangan sebesar 62,83%, yang mana Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi masih berupa draf.

II. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.295.724.500 realisasi keuangan Rp. 1.123.817.904 (86,73 %) atau realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Opini BPK Terhadap LKPD.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 474.498.700 realisasi keuangan Rp 442.837.616 (93,33 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Opini BPK Terhadap LKPD.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.446.523.300 realisasi keuangan Rp 365.177.046 (81,78 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Opini BPK Terhadap LKPD.
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.294.664.234 realisasi keuangan Rp. 166.012.780.891 (97,49 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Opini BPK Terhadap LKPD.
5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 313.680.000 realisasi keuangan Rp. 288.701.850

(92,04 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Opini BPK Terhadap LKPD.

- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 691.643.700 realisasi keuangan Rp.613.547.065 (88,71 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.723.757.950 realisasi keuangan Rp.1.618.617.726 (93,90 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Rasio PAD terhadap Pendapatan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.751.840 realisasi keuangan Rp. 105.424.000 (93,50 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.361.098.688 realisasi keuangan Rp. 13.691.772.981 (95,34 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.500.000 realisasi keuangan Rp. 8.497.000 (67,98 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 638.911.200 realisasi keuangan Rp. 607.893.283 (95,15 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160.310.000 realisasi keuangan Rp. 152.964.375 (95,42 %) dan realisasi fisik kegiatan 100 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 671.497.750 realisasi keuangan Rp. 664.886.522 (99,02 %) dan realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 592.872.000 realisasi keuangan Rp. 556.698.322 (93,90 %) dan realisasi fisik kegiatan 100%. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

III. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2024 program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, umumnya semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana .

IV. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan Keuangan terlaksana dengan baik, Alokasi anggaran dan realiasi fisik kegiatan dapat tercapai 100%.

Hasil evaluasi selanjutnya yaitu terhadap renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2024. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan yaitu Rp. 191.790.433.862 Yang terdiri dari 4 program,14 Kegiatan dan 77 sub kegiatan. Berikut dijelaskan tingkat pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 95,40 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2024 adalah sebesar 100 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 100%
 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 97,34 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2024 adalah sebesar 100 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 100 %
 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 88,71 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2024 adalah sebesar 100 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 100 %
 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 93,90 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2024 adalah sebesar 100 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 100 %
- V. Implikasi yang Timbul terhadap target Capaian Program Renstra Badan Keuangan.
1. Tidak tercapainya target kinerja Sub kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota realisasi keuangan sebesar 73,60%, yang mana Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota tidak dapat ditetapkan karena tidak tercapainya kesepakatan dengan DPRD

2. Tidak tercapainya target kinerja Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah realisasi keuangan sebesar 62,83%, yang mana Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi masih berupa draf

VI. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran perlu diimplementasikan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan program/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Rencana Strategis tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 dengan tujuan target kinerja Renstra pada akhir periode rencana dapat tercapai meliputi :

1. Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran pada Tahun Anggaran 2026 hendaknya ditata secara proporsional
2. Pelaksanaan kegiatan, hendaknya dilakukan penjadwalan secara tepat/cermat, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan target

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD dalam lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, serta ditentukan pula dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sudah menyusun dan mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga perlu dijelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan.

Dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6) dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Fungsi Antara lain :

- a. Perumusan teknis dibidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Perumusan teknis dibidang Penagihan, Pembinaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- c. Perumusan teknis dibidang Aset Daerah;
- d. Perumusan teknis dibidang Anggaran;
- e. Perumusan teknis dibidang Perbendaharaan;
- f. Perumusan teknis dibidang Akuntansi
- g. Pelaksana Administrasi badan; dan
- h. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 disajikan dalam tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri atas dua (2) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mempunyai 2 indikator :
 - a. Opini BPK terhadap LKPD
 - b. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip, yang mempunyai 2 indikator yaitu :

- a. Skor IKM Badan Keuangan
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan
- Pada Tahun 2024, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah mencapai target IKU yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Sebesar 81,49 %.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasion al	IKK	Target Renstra Badan Keuangan				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	-	0,0853	0,0853	0,0967	0,1035	0,0677	0,0746	0,0792	0,0967	0,1035	
2	Opini BPK atas LKPD (WTP)	IKU	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Realisasi tahun 2024 merupakan kondisi bulan juni tahun 2024
3	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN	IKU	-	87,98	89,97	91,97	93,96	85,98	83,65	88,75	91,97	93,96	
4	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IKU	-	64,37	67.02	69,68	72,34	64,37	60,60	68,52	69,68	72,34	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Dengan penyelenggaraan program/kegiatan yang telah dilaksanakan maka dampaknya terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Terciptanya pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam wujud laporan keuangan daerah
- 2. Tujuan dimaksud dikatakan tercapai apabila Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa “Wajar Tanpa Pengecualian”
- 3. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi Daerah.
- 4. Terbitnya administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, masih ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1. Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya
- 2. Belum optimalnya proses penyusunan APBD
- 3. Belum terintegrasinya data pajak daerah dengan stakeholder terkait
- 4. Belum optimalnya pemungutan pajak daerah
- 5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk kemudahan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimal Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Anggaran	Belum sesuai pemanfaatan alokasi anggaran untuk menunjang Prioritas Daerah, Propinsi dan Nasional
			Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam Perencanaan Anggaran disebabkan sering berubahnya regulasi
			Masih rendahnya komitmen kepala Badan

			Keuangan dalam Perencanaan Anggaran
		Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Belum konsistennya perencanaan kegiatan dengan alokasi aliran kas
			Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam pengelolaan perbendaharaan disebabkan sering berubahnya regulasi
			Belum optimalnya aplikasi SIPD pada modul penatausahaan
			Masih belum terkoneksi sistem aplikasi pemda dengan lembaga lainnya
		Belum Optimalnya peningkatan Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Belum memadainya Penerapan aplikasi SIPD dan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)
			Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
			Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam Akuntansi disebabkan sering berubahnya regulasi
		Belum Optimalnya peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah	Menuntut kesiapan aparatur untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan asset yang sering berubah
			Belum terlaksananya manajemen aset yang efektif dan efisien
			Belum semua aset daerah berupa tanah bersertifikat
			Belum terkoneksi SIPD dengan Aplikasi Aset Daerah (SIMDA)

2	Masih rendahnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Masih kurangnya tingkat akurasi dan aktualitas data pendapatan asli daerah	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pemungutan pajak daerah Belum lengkapnya regulasi pelaksanaan sebagai pendukung dalam pengelolaan pajak daerah Belum tersedianya infrastruktur ETPD dalam mendukung pengelolaan pajak daerah Rendahnya tingkat pencapaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah Belum tersedianya tenaga (penilai, penagih, juru sita, pemeriksa) yang dibutuhkan sesuai spesifikasi. Belum optimalnya pemahaman aparaturnya terhadap pajak daerah Belum intensifnya kegiatan pemungutan pajak daerah yang dilakukan Belum optimalnya komitmen dan koordinasi dengan instansi terkait dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, agar tidak terjadi pemotongan anggaran Program/Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disarankan atau diharapkan untuk mendukung pelaksanaan ke lapangan didukung oleh personil yang memadai sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan.
3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada Badan Keuangan hendaknya didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik dan lancar peninjauan lapangan terhadap permasalahan yang timbul memerlukan koordinasi.
2. Adanya/terselenggaranya forum komunikasi dalam bentuk rapat-rapat dalam memberikan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada dengan cara pendekatan dan koordinasi sehingga peran serta instansi vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Motor penggerak program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.
4. Dana yang tersedia.
5. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan berkelanjutan oleh masing-masing unit kerja
2. Menambah Pegawai yang mengerti dengan jaringan
3. Melakukan Rekon Laporan Keuangan Tepat Waktu
4. Penambahan sarana/ peralatan pendukung
5. Pelatihan bagi pengguna SIPD
6. Melakukan Rekon Aset Tepat Waktu
7. Menambah sarana/ peralatan pendukung
8. Upgrade frekwensi
9. Membentuk Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan (Perda)
10. Selalu Melakukan Kajian dan Telaahan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan
11. Melakukan Monitoring dan Identifikasi terhadap Objek Pajak dan Retribusi Yang Baru
12. Melakukan Evaluasi, pendataan barang secara Berkala
13. Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi Bagi Pengurus Barang
14. Pelaksanaan rekon antara Bidang aset dan para pengurus barang
15. Pemantauan atas pencatatan asset

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjabarkan misi kedua dan keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. Pengelolaan keuangan daerah;
3. Pengelolaan barang milik daerah;
4. Pengelolaan pendapatan daerah.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 4 :			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.			
	Program Prioritas :			
	1. Penunjang urusan pemerintahan daerah	Belum semua aparatur menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur BKD
	2. Pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya proses penyusunan APBD	Kurang cermat dalam penyusunan RKA	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
	3. Pengelolaan barang milik daerah	Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah	Kurangnya kemampuan SDM pengelola barang milik daerah di OPD	1. Adanya Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan barang milik daerah 2. Audit aset dari aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah
	4. Pengelolaan pendapatan daerah	Belum terintegrasinya data pajak daerah dengan stakeholder terkait	1. Belum maksimalnya pelaksanaan SOP pemungutan pajak daerah 2. Belum	Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemungutan pajak daerah

			diterapkannya sanksi bagi aparaturn dan wajib pajak	
2.	Misi 2			
	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah 1. Pengelolaan pendapatan daerah	Belum optimalnya pemungutan pajak daerah	1. Sulitnya penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 3. Kurang optimalnya provider sistem dalam memberikan pelayanan jaringan	1. Pelayanan Pajak daerah sudah berbasis teknologi informasi 2. Memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar 3. Letak geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang strategis berbatasan dengan Provinsi Riau

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan kegiatan Badan Keuangan tidak mengalami perubahan atau sama dengan Rancangan Awal Renja Badan Keuangan Pelaksanaan kegiatan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD
2. Penyesuaian RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
3. Penyesuaian Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Pada akhirnya, Rancangan Awal Renja Rencana Perangkat Daerah juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut sudah ditetapkan dengan sebuah Peraturan Kepala Daerah, catatan penting dan rumusan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R KINERJA	TARGET CAPAIN KINERJA	PAGU INDIKATIF KEBUTUHAN PAGU	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KEUANGAN				62.033.938.299,0 0	BADAN KEUANGAN					
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				62.033.938.299,0 0	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEUANGAN				62.033.938.299,0 0	KEUANGAN					
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintah</i>	100 %	52.172.923.499,0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintah</i>	100 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sarilamak	<i>IKM Badan Keuangan</i>	85 Indeks	175.530.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sarilamak	<i>IKM Badan Keuangan</i>	85 Indeks	43.551.400,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	36.995.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	13.493.400,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	3 Dokumen	18.461.200,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	3 Dokumen	11.875.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	18.234.800,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	0 Dokumen	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	17.040.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	14.387.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										

		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	31.808.300,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	0 Dokumen	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	22 Laporan	26.492.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	0 Laporan	0,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	26.499.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	15.671.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sarilamak	<i>IKM Badan Keuangan</i>	85 Indeks	49.973.716.719,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sarilamak	<i>IKM Badan Keuangan</i>	85 Indeks	22.041.487.869,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

		Sarilamak	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	6425 Orang/bulan	49.973.716.719,00		Sarilamak	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	6425 Orang/bulan	22.014.493.669,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	13.493.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	2 Laporan	0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	2 Laporan	13.501.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1 Dokumen	0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	0 Dokumen	0,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Skor IKM Badan Keuangan	85 .	0,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Skor IKM Badan Keuangan	85 .	0,00	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12 Laporan	0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	0 Laporan	0,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		IKM Badan Keuangan	85 Indeks	330.013.600,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		IKM Badan Keuangan	85 Indeks	0,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i>	12 Dokumen	195.001.500,00		Sarilamak	<i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i>	Dokumen	0,00	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah</i>	100 Dokumen	135.012.100,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah</i>	Dokumen	0,00	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Skor IKM Badan Keuangan	85 Indeks	0,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Skor IKM Badan Keuangan	85 Indeks	12.500.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Sarilamak	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	105 Orang	0,00		Sarilama k	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	Orang	0,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Sarilamak	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan</i>	95 Orang	0,00		Sarilama k	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	95 Orang	12.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		IKM Badan Keuangan	85 Indeks	686.242.880,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		IKM Badan Keuangan	85 Indeks	343.020.374,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Sarilamak	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	35.000.000,00		Sarilama k	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	8.160.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

		Sarilamak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00		Sarilamak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.420.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Sarilamak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	36.500.000,00		Sarilamak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.340.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Sarilamak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	144.101.680,00		Sarilamak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.852.774,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Sarilamak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.593.200,00		Sarilamak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.455.100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
		Sarilamak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	19.000.000,00		Sarilamak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.220.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	135.000.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	66.860.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	60 Laporan	244.048.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	60 Laporan	192.712.500,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Skor IKM Badan Keuangan	85 .	232.000.000,00			Skor IKM Badan Keuangan	85 .	48.999.996,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Sarilamak	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	4 Unit	0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	0 Unit	0,00	
	Pengadaan Mebel										
		Sarilamak	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	25 Unit	232.000.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	0 Unit	0,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Sarilamak	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		7 Unit 0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	7 Unit	48.999.996,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Badan Keuangan	85 Indek	276.440.000,00			IKM Badan Keuangan	85 Indek	566.145.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	26.440.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	6.990.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	250.000.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	154.755.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	404.400.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Badan Keuangan	85 Indek	498.980.000,00			IKM Badan Keuangan	85 Indek	284.440.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

		Sarilamak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	423.980.000,00		Sarilamak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	265.740.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Sarilamak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	75.000.000,00		Sarilamak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	8.690.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Sarilamak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Sarilamak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi	1 Unit	10.010.000,00	
2,	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	6.833.097.600,00					159.728.276.327,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP .	2.389.272.200,00			Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP .	923.520.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
		Sarilamak	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	314.158.800,00		Sarilamak	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	141.598.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	4 Dokumen	269.261.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	4 Dokumen	142.318.600,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	42 Dokumen	168.544.400,00		Sarilamak	<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	42 Dokumen	67.700.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	42 Dokumen	235.857.500,00		Sarilamak	<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	42 Dokumen	104.612.500,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>	42 Dokumen	160.135.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	42 Dokumen	67.797.500,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	126 Dokumen	178.450.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>	126 Dokumen	108.487.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	6 Dokumen	371.706.900,00		Sarilamak	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	6 Dokumen	117.083.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										

		Sarilamak	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	6 Dokumen	298.438.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	6 Dokumen	114.578.700,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	4 Dokumen	151.721.100,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	4 Dokumen	59.345.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	6 Dokumen	50.455.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	Dokumen	0,00	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	84 Orang	190.544.500,00		Sarilamak	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Orang	0,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP .	0,00			Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP .	305.418.340,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										

		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaa n Kas Daerah</i>	12 Dokumen	0,00		Sarilama k	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	12 Dokumen	59.333.000,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendali an dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	172 Dokumen	0,00		Sarilama k	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>	172 Dokumen	19.734.500,00	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausa haan Pembiayaa n Daerah</i>	12 Dokumen	0,00		Sarilama k	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausaha an Pembiayaan Daerah</i>	12 Dokumen	15.130.000,00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisas i, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaa n Dana Perimbang an dan Dana Transfer Lainnya</i>	12 Dokumen	0,00		Sarilama k	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	12 Dokumen	26.022.000,00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
		Sarilamak	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		18 Laporan 0,00		Sarilamak	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	18 Laporan	20.380.400,00	

			<i>Ketiga (PFK)</i>								
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>	9 Dokumen	0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>	9 Dokumen	22.175.000,00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait										

		Sarilamak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	86 Dokumen	0,00		Sarilamak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	86 Dokumen	82.618.640,00	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan										
		Sarilamak	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	8 Dokumen	0,00		Sarilamak	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	8 Dokumen	82.618.640,00	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	100 Orang	0,00		Sarilamak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/K	0 Orang	0,00	

			Kabupaten / Kota					ota			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Opini BPK terhadap LKPD	WTP .	1.165.381.400,00			Opini BPK terhadap LKPD	WTP .	305.153.700,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban										
		Sarilamak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	84.073.800,00		Sarilamak	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	23.108.600,00	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										
		Sarilamak	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	69.928.500,00		Sarilamak	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	18.227.000,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										
		Sarilamak	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan	124.394.500,00		Sarilamak	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolida	65 Laporan	32.351.500,00	

			yang Terkonsolidasi					si			
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	221.806.400,00		Sarilamak	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	57.712.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah										
		Sarilamak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	2 Dokumen	86.812.300,00		Sarilamak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	2 Dokumen	22.534.000,00	

			<i>Kerugian Daerah</i>					<i>Daerah</i>			
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	60 Dokumen	204.791.700,00		Sarilamak	<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>	60 Dokumen	53.372.000,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	373.574.200,00		Sarilamak	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	2 Orang	97.848.600,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK terhadap LKPD	WTP -	2.510.000.000,00			Opini BPK terhadap LKPD	WTP -	157.984.240.487,00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan										

		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	12 Laporan	0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	12 Laporan	149.175.195.479,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	12 Laporan	2.510.000.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	12 Laporan	2.195.403.301,00	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	6.613.641.707,00	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Opini BPK terhadap LKPD	WTP .	768.444.000,00			Opini BPK terhadap LKPD	WTP .	209.943.000,00	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah</i>	12 Dokumen	484.944.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah</i>	12 Dokumen	147.943.000,00	

			Daerah Bidang Keuangan Daerah					Daerah Bidang Keuangan Daerah			
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Sarilamak	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	182 Orang	283.500.000,00		Sarilama k	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ K ota	100 Orang	62.000.000,00	
3,	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Indeks pengelolan barang milik daerah	93 point	1.049.006.300,00					465.824.800,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Opini BPK Terhadap LKPD	WTP .	1.049.006.300,00			Opini BPK Terhadap LKPD	WTP .	465.824.800,00	
	Penyusunan Standar Harga										
		Sarilamak	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	90.000.000,00		Sarilama k	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	34.897.150,00	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	2 Dokumen	45.000.000,00		Sarilama k	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	0,00	

			<i>Barang Milik Daerah</i>								
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	2 Dokumen	54.999.900,00		Sarilama k	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	2 Dokumen	30.924.700,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah</i>	12 Laporan	55.998.000,00		Sarilama k	<i>Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah</i>	0 Laporan	0,00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisa si (LHI) Barang Milik Daerah</i>	12 Laporan	96.575.250,00		Sarilama k	<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	0 Laporan	0,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamana n Barang Milik Daerah</i>	12 Laporan	97.970.100,00		Sarilama k	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	12 Laporan	260.000.150,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah										

		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	12 Laporan	155.306.800,00		Sarilama k	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>	0 Laporan	0,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n dan Pengendali an Pengelolaa n Barang Milik Daerah</i>	12 Laporan	164.999.700,00		Sarilama k	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	12 Laporan	24.502.650,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisa si Penggunaa n, Pemanfaat an, Pemindaht anganan, Pemusnaha n, dan Penghapus an Barang Milik Daerah</i>	1 Dokumen	84.999.900,00		Sarilama k	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan , Pemindahtan ganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	0 Dokumen	0,00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan</i>	4 Laporan	124.999.850,00		Sarilama k	<i>Jumlah Laporan</i>	4 Laporan	38.500.050,00	

			Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
		Sarilamak	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	78.156.800,00		Sarilamak	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	77.000.100,00	
4,	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD terhadap pendapatan	9,67 %	1.978.910.900,00					890.669.050,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1:0,0967	1.978.910.900,00			Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1:0,0967	890.669.050,00	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah										
		Sarilamak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen	203.940.000,00		Sarilamak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen	40.000.050,00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah										
		Sarilamak	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	4 Dokumen	280.000.000,00		Sarilamak	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	4 Dokumen	75.000.000,00	

			<i>Kebijakan Pajak Daerah</i>								
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	12 Laporan	137.502.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	12 Laporan	98.443.500,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	12 Unit	194.996.600,00		Sarilamak	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	12 Unit	166.567.400,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	9 Laporan	319.173.900,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>	9 Laporan	45.000.000,00	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)										
		Sarilamak	<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	11 Obyek Pajak	145.001.100,00		Sarilamak	<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	11 Obyek Pajak	100.717.100,00	

	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	40 Layanan	80.000.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	40 Layanan	12.000.000,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>	50 Dokumen	146.492.300,00		Sarilamak	<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>	50 Dokumen	29.760.550,00	
	Penagihan Pajak Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	150 Dokumen	169.996.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	150 Dokumen	139.572.000,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	8 Dokumen	188.509.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>	8 Dokumen	50.001.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										

		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	4 Laporan	0,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	4 Laporan	34.000.000,00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah										
		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	10 Laporan	113.300.000,00		Sarilamak	<i>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	10 Laporan	45.000.000,00	
					62.033.938.299,00					184.445.480.016,	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah , Salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena hakekatnya masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Untuk Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat kedalam renja Badan Keuangan

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional di bidang keuangan tahun 2026 menekankan penguatan stabilitas fiskal, peningkatan kualitas belanja, serta optimalisasi pendapatan negara dan daerah. Pemerintah mendorong konsolidasi fiskal melalui efisiensi anggaran, penguatan tata kelola keuangan, serta peningkatan kapasitas pendapatan, termasuk melalui digitalisasi administrasi perpajakan dan PNPB. Arah kebijakan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan akurasi perencanaan, efektivitas penganggaran, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, kebijakan nasional tersebut menjadi pedoman untuk memperkuat manajemen pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pemutakhiran data objek pajak, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Di sisi belanja, kebijakan nasional mendorong penguatan pengelolaan APBD yang berbasis kinerja, peningkatan efisiensi belanja, serta pengendalian disiplin anggaran agar APBD lebih produktif dan tepat sasaran.

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional tersebut, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 difokuskan pada peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta penyempurnaan layanan administrasi keuangan dan pendapatan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 disusun dengan tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah **"Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional"** indikator tujuan yaitu **"Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB"**

Adapun Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ada 2 (dua) Sasaran adalah :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
Indikator Sasaran yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan
Sasaran ini menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang rapi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memperoleh opini baik dari BPK.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja serta pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Indikator Sasaran yaitu:
 - a. Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Fokus sasaran ini adalah peningkatan kapasitas internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam memberikan layanan yang profesional dan berkinerja tinggi

3.2.1 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pencapaian tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta sasaran-sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2026 dilakukan melalui rangkaian langkah yang terencana, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Upaya ini difokuskan pada penguatan peran fiskal daerah, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi kinerja internal perangkat daerah.

Untuk mendukung **sasaran daerah**, yaitu meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupaya mendorong optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor perpajakan. Hal ini dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, pemanfaatan teknologi informasi perpajakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sehingga kontribusi fiskal daerah terhadap perekonomian semakin kuat. Dalam rangka mencapai **Sasaran OPD**, yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset, serta penegakan disiplin administrasi keuangan menjadi kunci untuk mempertahankan atau meningkatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, untuk mewujudkan **sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja serta pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**, perangkat daerah ini mengarahkan program pengembangan SDM,

penerapan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas proses bisnis, serta percepatan layanan administrasi keuangan dan pendapatan. Evaluasi internal melalui AKIP, penguatan nilai Reformasi Birokrasi (RB), serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi instrumen pengendali untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Melalui kombinasi upaya tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan peningkatan kinerja fiskal daerah secara menyeluruh, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pencapaian pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026.

Dalam upaya mewujudkan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta mencapai sasaran strategis tahun 2026, Dalam upaya mewujudkan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta mencapai sasaran strategis tahun 2026, Dalam upaya mewujudkan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta mencapai sasaran strategis tahun 2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan sejumlah strategi yang terarah dan saling mendukung. Strategi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan sejumlah strategi yang terarah dan saling mendukung. Strategi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan sejumlah strategi yang terarah dan saling mendukung. Strategi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang keuangan dan pendapatan daerah

Strategi Pencapaian Sasaran 1 – Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

- Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan penganggaran sesuai prinsip value for money.
- Memperkuat disiplin administrasi keuangan dan penatausahaan aset daerah.
- Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis keuangan, akuntansi, dan pengelolaan aset.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintah untuk mendukung pencapaian Opini BPK yang lebih baik.

Strategi Pencapaian Sasaran 2 – Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Kinerja serta Pelayanan BPKPD

- Mengimplementasikan manajemen kinerja berbasis AKIP secara konsisten dan terukur.
- Memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan proses bisnis dan penguatan budaya kerja.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan, percepatan proses, dan pemanfaatan teknologi digital.
- Memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi untuk memastikan peningkatan nilai AKIP, RB, dan IKM secara berkelanjutan.
- Mendorong budaya pelayanan prima untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Berikut disajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.1 di halaman selanjutnya.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"	4.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan	4.1.3 Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.19	0.21	0.23	0.25	0.27	0.29

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2026 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah erat kaitannya dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Membangun Ekonomi Kerakyatan Dan Pariwisata Yang Tangguh Dan Berkeadilan”.

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihasilkanlah 4 program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu:

- 1. Program dan kegiatan pada setiap PD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin;
- 2. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Keuangan;
- 3. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Barang Milik Daerah;
- 4. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Barang Pendapatan;

Ringkasan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel - 3.2

Program dan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.1.			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2.			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3.			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
1.1.4.			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.5.			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.1.6.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7.			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2.3			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.2.4			Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Semesteran
1.2.5			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada	

		Perangkat Daerah	
1.3.1.			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.4.1.			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4.2.			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4.3.			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.5.1.			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2.			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3.			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.4.			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5.5.			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.5.6.			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.5.7.			Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.5.8.			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.6.1.			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2.			Pengadaan Mebel
1.6.3.			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.4.			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.6.1.			Penyediaan jasa surat menyurat
1.6.2.			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.6.3.			Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.6.4.			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.7.1.			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2.			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.3.			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jml	1 Program	7 Kegiatan	35 Sub Kegiatan

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900.1.15-1317 Tahun 2023 Program yang harus ada di Badan Keuangan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 1 Program dengan 7 Kegiatan serta 35 Sub Kegiatan.

Tabel. 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan
Urusan Bidang Keuangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
1.1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	

		Daerah	
1.1.1.			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
1.1.2.			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1.1.3.			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
1.1.4.			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
1.1.5.			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
1.1.6.			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
1.1.7.			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1.1.8.			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.1.9.			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
1.1.10.			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
1.1.11.			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
1.1.12.			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
1.2.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
1.2.1			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
1.2.2			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1.2.3			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
1.2.4			Penatausahaan Pembiayaan Daerah

1.2.5			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
1.2.6			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
1.2.7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
1.2.8			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
1.2.9			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
1.2.10			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
1.2.11			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
1.3.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
1.3.1.			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
1.3.2.			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,

			Pendapatan-LO dan Beban
1.3.3.			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
1.3.4.			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.3.5.			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
1.3.6.			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.3.7.			Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan
1.3.8.			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.3.9.			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
1.3.10.			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.3.11.			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
1.3.12.			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
1.4.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
1.4.1.			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

1.4.2.			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
1.4.3.			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
1.5.		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
1.5.1.			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
1.5.2.			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
2.1.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	
2.1.1.			Penyusunan Standar Harga
2.1.2.			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
2.1.3.			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
2.1.4.			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.1.5.			Penatausahaan Barang Milik Daerah
2.1.6.			Inventarisasi Barang Milik Daerah
2.1.7.			Pengamanan Barang Milik Daerah
2.1.8.			Penilaian Barang Milik Daerah
2.1.9.			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.1.10.			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

			Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
2.1.11.			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
2.1.12.			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
2.1.13.			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
3.1.		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
3.1.1.			Perencanaan pengelolaan pajak daerah
3.1.2.			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
3.1.3.			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3.1.4.			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
3.1.5.			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
3.1.6.			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
3.1.7.			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3.1.8.			Penetapan Wajib Pajak Daerah
3.1.9.			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
3.1.10.			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
3.1.11.			Penagihan Pajak Daerah
3.1.12.			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
3.1.13.			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

3.1.14.			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
3.1.15.			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Jml	3 Program	8 Kegiatan	67 Sub Kegiatan

Untuk Urusan Keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Badan Keuangan pada tahun 2026 melaksanakan 3 Program 7 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan.

Sebagai PD yang memiliki peran strategis dalam bidang Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dukungan ini diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan subkegiatan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak secara langsung melaksanakan Sub Kegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029. Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada fungsi koordinasi, fasilitasi, serta sinkronisasi keuangan pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah teknis, sehingga program prioritas dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak memiliki daftar Sub Kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah, sehingga pada Tabel 3.5 berikut keterangan yang dicantumkan adalah NIHIL.

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pendukung Prioritas Kabupaten

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		NIHIL		

Namun demikian, meskipun tidak melaksanakan Sub Kegiatan prioritas secara langsung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan keterpaduan pengelolaan Keuangan . Melalui fungsi koordinatif tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menjadi penggerak utama dalam mengarahkan perangkat daerah teknis agar pelaksanaan program prioritas daerah dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Adapun mengenai uraian Sub Kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.5 pada halaman selanjutnya

Tabel .3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota

KODE					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2				KEUANGAN				204.444.602.623				195.737.549.300
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan Pemerintah	Kec. Harau	100 %	27.674.646.723	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	100 %	28.534.967.300
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	116.968.600	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	120.531.300
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	25.465.284.123	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	26.291.000.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	84.500.000	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	90.500.000

5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	383.334.000	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	397.736.000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	686.500.000	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	686.200.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	624.996.000	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	630.000.000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Skor IKM Badan Keuangan	Kec. Harau	BB -85 .	313.064.000	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKU OPD	BB -85 .	319.000.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	174.690.336.509	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	164.886.082.000
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	1.126.993.000	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	1.169.500.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	392.000.000	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	412.000.000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	350.000.000	Dana Transfer Umum - Alokasi	IKD	WTP	379.000.000

										Umum			
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	172.497.643.509	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	162.600.000.000
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Kec. Harau	WTP	323.700.000	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	325.582.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Terhadap LKPD	Kab.Lima Puluh Kota	WTP	620.603.000	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	659.500.000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	Kab.Lima Puluh Kota	WTP	620.603.000	Dana Transfer Umum - Alokasi Umum	IKD	WTP	659.500.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	Kab.Lima Puluh Kota	10,35 %	1.459.016.391	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IKD	10,35 %	1.657.000.000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kab.Lima Puluh Kota	1:0.0967	1.459.016.391	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IKD	1:0.0967	1.657.000.000
TOTAL									204.444.602.623				195.737.549.300

--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Tahun 2026 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan terakhir diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 secara lengkap dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						200.034.652.450,00							211.210.010.073,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						200.034.652.450,00							211.210.010.073,00	
	5.02	KEUANGAN						200.034.652.450,00							211.210.010.073,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	24.203.848.950,00						-	34.340.323.973,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	185.319.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	194.775.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	19.777.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		21.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	18.968.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		19.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	19.955.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		21.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	18.484.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		19.425.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		22.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		15.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	21.986.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		23.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	50.149.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		52.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.486.631.462,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	30.698.466.173,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6425 Orang/bulan	20.445.631.462,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		30.655.416.173,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		15.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		15.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		11.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	90.628.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	95.025.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	63.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		66.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				105 Orang	13.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		14.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				95 Orang	13.428.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		14.175.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	397.665.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	418.672.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.458.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		16.291.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.979.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		10.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		8.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	52.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		54.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		30.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	2.220.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		2.331.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	78.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		81.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	204.008.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		214.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.406.455.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.347.675.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	723.805.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		840.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	101.194.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	281.456.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		87.675.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				20	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		315.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	784.224.688,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	661.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	7.997.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		8.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	156.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		163.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	620.226.888,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		489.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	852.925.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	924.210.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				49 Unit	551.075.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		578.760.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	28.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		30.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	273.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		315.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	173.429.183.500,00						-	174.585.161.100,00	
		[Opini BPK]	-	-	-	-	-	173.429.183.500,00	-	-	-	-	-	-	174.585.161.100,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.230.501.300,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.227.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	177.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		178.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	182.800.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		183.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				43 Dokumen	79.973.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		78.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				43 Dokumen	124.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		121.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	77.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		76.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	142.008.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		129.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				6 Dokumen	170.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		178.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	195.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		204.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	69.720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		64.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				6 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		11.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	173.429.183.500,00	-	-	-	-	-	-	174.585.161.100,00	-
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	412.038.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	432.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	63.003.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		66.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				172 Dokumen	21.997.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		23.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				12 Dokumen	41.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		44.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	28.070.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		29.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	41.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		44.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				18 Laporan	20.993.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		22.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				9 Dokumen	21.005.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		22.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				86 Dokumen	62.981.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		66.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				8 Dokumen	110.008.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		115.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	501.999.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	1.850.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	31.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		33.075.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	79.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		84.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				65 Laporan	43.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		45.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	78.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		82.425.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				4 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		84.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				60 Dokumen	49.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		51.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	140.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.470.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	170.959.110.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	-	-	170.730.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				79 Laporan	163.359.110.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	-		162.750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	1.600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.680.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				79 Laporan	6.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an kemajuan dan keman dirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	-		6.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	325.534.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	345.011.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	188.610.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		198.047.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				129 Orang	136.924.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		146.963.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	814.613.800,00						-	772.525.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	814.613.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	772.525.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	72.001.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		75.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	30.000.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		31.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	47.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		49.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	110.110.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		31.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				12 Laporan	25.000.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		26.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	280.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		294.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		31.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	26.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		27.825.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	20.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		21.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	64.002.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		69.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	110.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	1.587.006.200,00						-	1.512.000.000,00	
		[Persentase PAD terhadap Pendapatan]	-	-	-	-	-	1.587.006.200,00	-	-	-	-	-	-	1.512.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.587.006.200,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.512.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				9 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		145.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	160.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		170.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				12 Unit	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		375.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	82.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		86.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			0				0 0	47.000.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				11 Obyek Pajak	165.001.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				40 Layanan	14.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		16.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				50 Dokumen	90.000.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				150 Dokumen	190.004.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				8 Dokumen	96.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				10 Laporan	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	JUMLAH							200.034.652.450,00							211.210.010.073,00	

Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut:

Tabel . 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

No	Bidang Urusan	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2026		Tahun 2027
		Program			Kegiatan		
		Jumlah	Total Pagu (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	1	24.203.848.950	34.340.323.973	9	24.203.848.950	34.340.323.973
2	Urusan Keuangan	3	175.830.803.500	176.869.686.100	7	175.830.803.500	176.869.686.100
	Total	4	200.034.652.450	211.210.010.073	16	200.034.652.450	211.210.010.073

BAB V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan ini terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Badan Keuangan disusun dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang tertuang dalam pilihan program dan kegiatan.

Dengan memuat pilihan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini diharapkan akan menjadi acuan dalam menyelenggaraan urusan pemerintah yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat dan para pihak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak yang terkait tersebut, diharapkan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 semakin berkualitas, dan kebijakan, rencana dan program pembangunan yang tertuang didalamnya akan mampu diimplementasikan dengan baik.

5.1 . Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 2026

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Poin utama dari beberapa catatan penting tersebut diatas adalah bahwa Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2025 harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain, dengan proses penyusunan yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak. Selain itu penyusunan dan tindak lanjut rencana kerja berupa pelaksanaan program dan kegiatan harus berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika perkembangan daerah. Hal ini memberi makna dalam bahasa sederhana bahwa rencana pembangunan daerah mengedepankan skala prioritas baik kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan segala keterbatasan daerah terkait pendanaan, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja sebagai salah satu bentuk Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan berorientasi kepada proses menggunakan pendekatan :

- a. teknokratik, dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. partisipatif; dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan melibatkan para pihak dan berbagai pemangku kepentingan;
- c. politis; dalam artian perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
- d. atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dalam artian perencanaan pembangunan Daerah merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/nagari, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 merupakan perwujudan tugas pokok, fungsi, urusan dan kewenangan. Sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah, Rencana Kerja dirumuskan dan dilaksanakan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Demikian Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan kewenangan di bidang Keuangan melalui pilihan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sarilamak, 30 Desember 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Drs. A. Zuhdi Perama Putra, M.Si
NIP. 19690218 199403 1 004